



URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL

Daftar kelompok :

- Ade Hikmat Pauji Ridwan (22552011130)
- Azhar Kurniawan (22552012036)
- Dimas Nurdiana Nugraha (19552011283)
- Hendra Gunawan (22552011143)
- Rama Triehadi (22552011169)
- Sendy Maulana (19552011260)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan. Tak lupa juga tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen selaku pembimbing mata kuliah ini serta segala pihak dan sumber yang telah membantu terwujudnya makalah ini. Tim penyusun berharap semoga makalah ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang. Seiring dengan itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas makalah yang akan kami hasilkan, dengan mengambil hikmah dari pengalaman dan upaya belajar yang lebih maksimal. Kami yakin bahwa dengan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, makalah-makalah yang akan datang akan semakin baik dan berkualitas.

Dalam proses penulisan makalah ini, kami menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan mutlak. Oleh karena itu, kami mengajak para pembaca untuk bersama-sama memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif. Dengan demikian, kami dapat terus mengasah kemampuan kami dalam menyusun makalah yang lebih baik dan lebih relevan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan dalam segala upaya dan perjuangan kita. Aamiin.

Bandung, 09 Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan	5
1.5 Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Ketahanan Nasional.....	6
2.2 Sejarah/latarbelakang adanya ketahanan Nasional	9
2.3 Unsur Ketahanan Nasional (Asta Gatra).....	13
2.4 Ketahanan Nasional berdimensi dan berlapis	15
2.5 Hakikat, Asas, dan Sifat Ketahanan Nasional.....	17
2.6 Bela Negara.....	20
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1. Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia Saat ini	25
3.2. Ancaman Potensial Saat ini dan Contoh Studi Kasusnya.....	26
3.3. Bentuk Bela Negara.....	39
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1. Kesimpulan.....	42
4.2. Kritik dan Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari ancaman yang dapat mengancam eksistensinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Setiap bangsa memiliki berbagai ancaman yang harus dihadapi dalam menjaga keamanan nasionalnya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini menghadapi ancaman dan gangguan dari berbagai aspek, seperti fisik dan ideologi. Sampai sekarang, Indonesia menghadapi ancaman yang semakin kompleks, termasuk ancaman separatis dan aksi provokasi yang mengganggu stabilitas kehidupan dengan nuansa etnis dan agama.

Namun, bangsa Indonesia telah berjuang dan berhasil menghadapi tantangan tersebut dengan semangat persatuan dan keutuhan. Mereka membutuhkan ketahanan nasional untuk menjaga keutuhan negara dan mencapai tujuan nasional. Bela negara merupakan peran penting bangsa Indonesia dalam menjalankan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga keamanan, keutuhan, kesejahteraan, dan kedamaian negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa konsep Ketahanan Nasional diperlukan oleh sebuah negara?
2. Apa saja ancaman potensial saat ini yang dapat membahayakan kelangsungan hidup dan keberlanjutan negara?
3. Bagaimana kondisi dinamika Ketahanan Nasional Indonesia saat ini jika dilihat dari beberapa aspek bidang ilmu?
4. Apa analisis mengenai esensi dan urgensi Ketahanan Nasional di Indonesia?
5. Apa analisis mengenai esensi dan urgensi Bela Negara di Indonesia?
6. Apa contoh studi kasus mengenai bentuk implementasi Ketahanan Nasional dan Bela Negara yang dapat dilakukan?

1.3 Batasan Masalah

Sedangkan untuk masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya akan di batasi sebagai berikut:

1. Masalah yang dijabarkan hanya terkait dengan Ketahanan Nasional dan Bela Negara secara umum
2. Ancaman yang dijabarkan adalah contoh bentuk ancaman potensial saat ini baik militer maupun nirmiliter
3. Aspek dari kondisi dinamika Ketahanan Nasional yang dijabarkan hanya terkait aspek umum seperti ekonomi, social budaya, hukum, dan teknologi secara umum
4. Analisa esensi dan urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara di Indonesia dilihat dari ancaman potensial
5. Studi kasus bentuk-bentuk ketahanan Nasional yang dapat dilakukan dalam bentuk sederhana sebagai masyarakat awam

1.4 Tujuan

Adapun tujuan untuk makalah ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan perlunya Ketahanan Nasional
2. Untuk mengetahui beberapa ancaman potensial saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Untuk mengetahui dinamika Ketahanan Nasional ditinjau dari berbagai aspek bidang ilmu
4. Untuk menganalisa esensi dan urgensi dari Ketahanan Nasional
5. Untuk menganalisa esensi dan urgensi dari Bela Negara
6. Untuk mengetahui beberapa contoh bentuk Ketahanan Nasional dan Bela Negara dari studi kasus

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari makalah ini antara lain:

1. Dapat mengetahui alasan perlu adanya Ketahanan Nasional
2. Dapat menganalisa esensi dan urgensi dari Ketahanan Nasional dan Bela Negara
3. Khusus bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran mengenai contoh-contoh bentuk ketahanan Nasional dan Bela Negara dari studi kasus
4. Khusus bagi pemerintahan, dapat memberikan gambaran mengenai beberapa bentuk ancaman potensial saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat menjalankan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ancaman tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ketahanan Nasional

2.1.1 Pengertian secara Etimologi

Secara etimologi, istilah "ketahanan" berasal dari kata "tahan" yang memiliki makna tabah, kuat, mampu menguasai diri, gigih, dan tidak menyerah. Ketahanan mengimplikasikan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan ancaman guna menjaga kelangsungan hidup.

Sementara itu, kata "nasional" berasal dari kata "nation" yang merujuk pada bangsa dalam konteks politik. Dalam konteks politik, bangsa merujuk pada persekutuan hidup orang-orang yang telah membentuk negara.

Dengan demikian, secara etimologi, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan, kekuatan, dan ketangguhan suatu bangsa dalam konteks politik.

2.1.2 Pengertian secara Terminologi

Secara terminologi, konsep ketahanan nasional dapat dijelaskan melalui tiga pengertian utama yang sering disebut sebagai wajah-wajah ketahanan nasional. Ketiga wajah ketahanan nasional tersebut meliputi:

1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin

Ketahanan nasional merupakan konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk dan jenis ancaman yang ada. Konsepsi ini didasarkan pada ajaran "Asta Gatra" yang menjadi landasan pemikiran. Sebagai doktrin nasional, ketahanan nasional adalah pendekatan terbaik yang dipercaya dan diadopsi oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan, serta menjadi panduan dalam menghadapi perkembangan lingkungan dan bangsa guna menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

2. Ketahanan nasional sebagai kondisi

Ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi yang dinamis, karena kondisi tersebut senantiasa berubah dan dapat meningkat atau menurun. Dengan kata lain, ketahanan nasional tidak bersifat statis melainkan selalu mengikuti perubahan yang terjadi.

3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan

Ketahanan nasional juga dipandang sebagai strategi, cara, atau pendekatan dalam menanggulangi ancaman. Pendekatan ini melibatkan segala aspek alamiah dan sosial yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi ancaman yang ada, dengan menggunakan prinsip Asta Gatra.

Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ketahanan nasional melibatkan konsepsi atau doktrin, merupakan kondisi yang dinamis, dan diimplementasikan melalui strategi, cara, atau pendekatan yang melibatkan berbagai aspek alamiah dan sosial dalam menghadapi ancaman.

2.1.3 Pengertian lainnya

- Pengertian secara Umum:

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dan potensi nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengancam eksistensi negara.

- Pengertian secara konstitusional (GBHN):

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencakup integritas dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan negara, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

- Pengertian secara operasional:

Secara operasional, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong dan berhasilnya pembangunan nasional.

- Pengertian menurut beberapa ahli:

Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi secara menyeluruh.

Pengertian ketahanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dinamis yang melibatkan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, menjaga integritas dalam berbagai aspek kehidupan nasional, mendorong pembangunan nasional, serta melibatkan keseluruhan aspek kehidupan nasional yang saling terintegrasi.

- Menurut Harjomataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar langsung atau tidaklangsung! dan bisa membahayakan kehidupan nasional.
- Menurut Suradinata dan Kaelan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah Negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampumengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan Nasional.

2.2 Sejarah/latarbelakang adanya ketahanan Nasional

Adapun sejarah terbentuknya ketahanan nasional dapat dirumuskan dari beberapa garis waktu dimulai dari tahun 1960. Paparan garis waktu tersebut antara lain:

- ***Konsepsi Tahun 1960-an***

Gagasan tentang Ketahanan Nasional bermula pada awal tahun 1960an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOEAD (Sunardi, 1997) masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi Negara komunis, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Concern atas fenomena tersebut, para pemikir militer di SSKAD mengadakan pengamatan atas kejadian tersebut. Bahwa tidak adanya perlawanan yang gigih dan ulet di Indo Cina dalam menghadapi ekspansi komunis. Jika dibandingkan dengan Indonesia, kekuatan apa yang dimiliki bangsa ini sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman termasuk pemberontakan dalam negeri. Jawaban sementara dari kalangan pemikir tersebut adalah adanya kemampuan territorial dan perang gerilya.

Tahun 1960an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, singapura dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, tetapi bakhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin memperkuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa Negara Indonesia terjamin dimaa mendatang. Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur kesatuan dan persatuan, serta kekuatan nasional.

- ***Konsepsi Ketahanan Nasional 1968***

Pengembangan atas pemikiran awal tersebut semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G 30 S PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh lemhanas (lembaga pertahanan nasional). Telah ada kemajuan konseptual pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut berupa

ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, social, dan militer.

- ***Konsepsi Ketahanan Nasional 1969***

Pada tahun 1969 lahir istilah “Ketahanan Nasional” yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam Ketahanan Nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi Ketahanan Nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia. Kata “segala” menunjukkan kesadaran akan spectrum ancaman yang lebih dari sekedar ancaman komunis dan/pemberontakan. Adapun konsepsi ketahanan nasional 1969 dirumuskan sebagai: *“Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia”*

- ***Konsepsi Ketahanan Nasional 1972***

Pada konsepsi 1972 ketahanan nasional dirumuskan sebagai : *“kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mengejar tujuan perjuangan nasional”*.

Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOM (Panca Gatra), dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Asta Gatra (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980: 95-96 dalam Triharso 2013). Pada hakekatnya konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972 merupakan hasil penyempurnaan dari konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1968 dan tahun 1969. Perumusan 1972 bersifat universal, dalam arti bahwa rumusan tersebut dapat diterapkan dinegara-negara lain, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang. Perbedaannya dengan konsepsi terdahulunya adalah jika dahulu ketahanan nasional di identikkan dengan keuletan dan daya tahan, maka ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang berarti bahwa kondisi itu dapat berubah. Selain itu konsepsi ketahanan nasional secara lengkap telah dicantumkan

tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan (ATHG). Serta maksud dari kata kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup.

- ***Rumusan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1973***

Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan nasional tahun 1972 dari Lemhanas.

- ***Ketahanan Nasional dalam Pidato Ir. Soekarno di tahun 1975***

Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Suharto di depan siding DPR tanggal 16 Agustus 1975, dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan dan keuletan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Karena keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional itu bersifat dinamis, bukan statis.

- ***Rumusan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1978, 1983, 1988***

Adapun rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1978, 1983, dan 1988 memiliki rumusan yang sama persis berbunyi sebagai berikut:

1. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan Negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu Bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara.
2. Untuk tetap memungkinkan berjalannya Pembangunan Nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus menerus Ketahanan Nasional yang meliputi segala aspek kehidupan Bangsa dan Negara.
3. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguhkan lebih mendorong lagi Pembangunan Nasional

- ***Rumusan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1993 dan GBHN 1998***

Setelah pada tahun 1978, 1983, dan 1988 rumusan ketahanan nasional pada GBHN tidak berubah, pada tahun 1993 memiliki penyempurnaan dengan pemaparan apa saja yang meliputi ketahanan nasional. Rumusan tersebut berlanjut hingga GBHN 1998. Adapun rumusan mengenai ketahanan Nasional tersebut yakni:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antar segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.
3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan social budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.

- **Rumusan Ketahanan Nasional dalam RPJMN 2010-2014**

Sekarang ini sebagai pengganti GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Namun pada dokumen ini tidak lagi ditemukan rumusan ketahanan nasional bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah dari ketahanan nasional. Namun demikian, masih dapat ditemukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional. Istilah-istilah tersebut antara lain seperti ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dll.

2.3 Unsur Ketahanan Nasional (Asta Gatra)

Terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra) sosial. Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia antara lain adalah sebagai berikut;

- Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu:

1. Gatra letak geografi atau wilayah

Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi: **Bentuk wilayah**, negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara continental. **Luas wilayah**, ada negara yang memiliki luas wilayah kecil adapula yang besar. **Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara**, apakah dalam posisi strategis. **Daya dukung wilayah**, ada wilayah yang habitable, dan ada wilayah yang unhabitable. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional.

2. Gatra keadaan dan kekayaan alam

Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan sumberdaya alam sebagai unsur ketahanan nasional seperti potensi SDA dalam wilayah yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan lingkungan hidup, serta control atau kendali atas sumber daya alam.

3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun social

- Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu:

1. Gatra Ideologi

Menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni berpotensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan, dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

2. Gatra Politik

Berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa

3. Gatra Ekonomi

Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan.

4. Gatra Sosial budaya (sosbud)

Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya, hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

5. Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa

2.4 Ketahanan Nasional berdimensi dan berlapis

2.4.1 Dimensi/Aspek Ketahanan Nasional

Sesuai dengan konsep ketahanan Nasional menurut GBHN 1998, aspek/dimensi dari ketahanan nasional secara umum dapat berupa:

1. Ketahanan Ideologi

Ketahanan ideology adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideology asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

2. Ketahanan Politik

Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara system politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

3. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

4. Ketahanan Sosial Budaya

Adalah kondisi kehidupan social budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan social budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkai penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional

5. Ketahanan Pertahanan keamanan

Adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkai segala bentuk ancaman.

2.4.2 Ketahanan Nasional berlapis

Ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan dibawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002)

2.5 Hakikat, Asas, dan Sifat Ketahanan Nasional

2.5.1 Hakikat Ketahanan Nasional

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan, selaras dalam, seluruh aspek, kehidupan nasional. dalam konteks ketahanan nasional:

1. Ketahanan Nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela.
2. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi
3. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan

2.5.2 Asas Ketahanan Nasional

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari:

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada

kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral)

3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan ke luar.

a. Mawas ke dalam

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).

b. Mawas ke luar

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

2.5.3 Sifat Ketahanan Nasional

1. Mandiri

Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian (independent) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent).

2. Dinamis

Ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik

3. Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.

4. Konsultasi dan kerjasama

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

2.6 Bela Negara

2.6.1 Pengertian Bela Negara

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.

2.6.2 Dasar Hukum Bela Negara

Adapun dasar hukum adanya belanegara dituangkan dalam berbagai pasal di dalam peraturan perundang-undangan baik itu UUD 1945 maupun UU. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara

2.6.3 Sifat Bela Negara

1. Sifat Lunak

Psychological

- Pemahaman ideologi negara (Pancasila dan UUD 1945)
- Nilai-nilai luhur bangsa
- Wawasan kebangsaan
- Persatuan dan kesatuan bangsa
- Kesadaran bela negara

Physical

- Perjuangan mengisi kemerdekaan
- Pengabdian sesuai profesi
- Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional
- Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer lainnya (ekonomi, sosial, budaya, dsb)

2. Sifat Keras

Adapun sifat keras dalam bela negara dapat diterapkan dalam menghadapi ancaman militer. Hal tersebut terbagi menjadi tiga komponen yaitu:

- Komponen Utama
- Komponen Cadangan (kombatan)
- Komponen Pendukung (Non kombatan)

2.6.4 Unsur Dasar Bela Negara

Unsur-unsur dasar dari bela negara sebagai nilai bela negara adalah:

1. Cinta Tanah Air

Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi:

- menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.
- bangga sebagai bangsa Indonesia
- menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia
- memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia
- mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara

Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi:

- memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat.
- melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya.
- berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.
- berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran:

- yang didasari pada Pancasila,
- pada kebenaran negara kesatuan republik Indonesia,
- bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya,
- setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat,
- bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi:

- memahami nilai-nilai dalam Pancasila.
- mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia
- senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila
- setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara

Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi:

- bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara.
- siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.
- memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara.
- memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.
- mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Secara psikis (mental) memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi

kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Secara fisik (jasmani) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Adapun indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi:

- memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan.
- senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya
- ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.
- terus membina kemampuan jasmani dan rohani.
- memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan.

2.6.5 Tujuan Bela Negara

Adapun yang termasuk kedalam tujuan bela negara antara lain:

1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
2. Melestarikan budaya
3. Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
5. Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara

2.6.6 Fungsi Bela Negara

Sedangkan fungsi dari bela negara itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman
2. Menjaga keutuhan wilayah negara
3. Merupakan kewajiban setiap warga negara
4. Merupakan panggilan sejarah

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia Saat ini

Ketahanan nasional Indonesia saat ini sedang mengalami krisis melihat dari berbagai masalah tentang ketahanan Nasional akhir-akhir ini yang mulai muncul dari berbagai aspek. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek, kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional melindungi bangsa Indonesia dari ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri. Sekarang ini sedang maraknya ancaman yang timbul dari luar bangsa Indonesia yang cukup mengganggu kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dapat merusak keadaan sosial masyarakat Indonesia.

Di era globalisasi ini, semakin banyak bentuk ancaman yang dapat mengancam kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini. Tidak hanya dari aspek keamanan dan hukum namun juga aspek – aspek lain seperti ekonomi, sosial budaya. Belum lagi dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi yang memudahkan munculnya ancaman-ancaman tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pertahanan nasional dan bela Negara yang dapat dilakukan dari hal-hal kecil yang sangat berpengaruh besar terhadap kondisi ketahanan Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi ketahanan nasional yang dilakukan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhanas 2016, indeks ketahanan nasional Indonesia berada pada angka 2,6 dari rentang 1-5. Artinya, kondisi ketahanan nasional Indonesia dalam posisi kurang tangguh. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari tantangan, ancaman, hambatan, gangguan. Apabila tidak diperbaiki maka dalam jangka panjang stabilitas nasional bisa goyah, terlebih ATGH bersifat dinamis, dan terus meningkat. Maka dari itu, ketahanan nasional itu harus terus dipupuk dan diperkuat. Tidak hanya kepada generasi muda, tapi semua generasi bangsa. Apalagi tantangan

globalisasi sangat luar biasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Semua harus bergerak dan berbuat untuk keutuhan NKRI.

3.2. Ancaman Potensial Saat ini dan Contoh Studi Kasusnya

3.2.1 Ancaman Ketahanan Nasional

Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Faktor-faktor yang mengganggu ketahanan nasional adalah berbagai macam bentuk tindakan maupun pemikiran yang mengancam ketahanan nasional suatu negara. Faktor-faktor pengganggu ini dapat disebut sebagai ancaman ketahanan nasional. Ancaman ketahanan nasional dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Berdasarkan datangnya ancaman
 1. Ancaman dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Contoh yang termasuk ancaman dari luar seperti agresi (serangan bersenjata), pelanggaran wilayah, spionase (mata-mata), sabotase (yang dapat merusak jaringan militer atau objek penting nasional), akso terror jaringan internasional, penjajahan, dll
 2. Ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri
- Berdasarkan bentuk ancaman
 1. Ancaman fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu Negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik seperti serangan senjata, penghilangan nyawa manusia, kerusakan fasilitas, terorisme, konflik berdarah, dan lain-lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri
 2. Ancaman non-fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu Negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideology, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

3.2.2 Studi Kasus Contoh Bentuk Ancaman Ketahanan Nasional

Adapun beberapa studi kasus yang dapat dijadikan contoh dari bentuk ancaman potensial yang dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia antara lain:

1. *Klaim Malaysia terhadap Budaya Indonesia*

Telah beberapa kali negeri Jiran Malaysia membuat panas hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara yang mengusung slogan “Truly Asia” itu telah berulang kali mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Beberapa klaim tersebut antara lain:

- Agustus 2007
Malaysia mengklaim dan mematenkan batik otif “Parang Rusak”, angklung, wayang kulit, hingga rending. Sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Sapta Nirwandar menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO sebagai masterpiece world heritage. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut.
- Oktober 2007
Lagu yang sangat mirip “Rasa Sayang” menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu “Rasa Sayange”. Lagu ini pernah di-upload di situs resmi pariwisata Malaysia dan disiarkan oleh televisi-televisi di Malaysia. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga DPR. Tapi Malaysia sempat berdalih lagu tersebut sudah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia. Sehingga tak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Demikian juga lagu “Indang Bariang” yang merupakan lagu asal daerah Sumatera tersebut.
- 21 November 2007
Para seniman Ponorogo kaget oleh munculnya Tari Barongan yang sangat mirip Reog Ponorogo. Padahal Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo dan mendapatkan Hak cipta No. 026377 pada 11 Februari 2004. Oleh Malaysia tarian ini di beri nama Tari Barongan. Website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia pernah memampangnya dan menyatakan tarian itu warisan dari Batu Pahat, Johor, dan Selanggor Malaysia.

- 25 November 2007
Pada acara “Kemilau Nusantara 2007” di Bandung, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Abdul Azis Harun, mengancam mengklaim Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Melayu. Ancaman tersebut akan dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah Indonesia masih mempersalahkan klaim Malaysia terhadap lagu “Rasa Sayange” yang dibuat di Malaysia pada tahun 1907 dan tari Barongan.
- Juni 2008
Staf Ahli Menko Kesra bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Malaysia, Komet Mangiri mengatakan bahwa Indonesia kalah cepat dari Malaysia mematenkan batik. Tapi yang berhasil dipatenkan itu hanya motif Parang Rusak. Adapun motif-motif lainnya berusaha diselamatkan dengan dipatenkan sejumlah perancang dan Pemerintah Daerah ke Depkumham dan Pemerintah mematenkan ke UNESCO.
- Maret 2009
Melihat perkembangan tersebut, Indonesia berupaya mematenkan batik, keris dan wayang. “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” kata kabag Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Agustus 2009
Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk “Enigmatic Malaysia”. Setelah dipersoalkan selama beberapa hari, Discovery Channel akhirnya tidak memunculkan iklan tersebut sejak senin 24 Agustus 2009. Pemerintah Malaysia menyatakan tidak pernah mengklaim Tari Pendet.

Selain yang telah dipaparkan diatas, masih banyak klaim-klaim yang telah dilakukan Malaysia atas budaya Indonesia seperti gamelan Jawa, tari Borbor, wayang kulit, dll. Klaim terhadap budaya ini merupakan salah satu bentuk contoh dari ancaman ketahanan Nasional terutama dalam dimensinya sebagai Ketahanan Sosial Budaya.

2. Kasus narkoba

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan letak geografis yang menguntungkan merupakan salah satu penyebab mudahnya akses narkoba masuk ke negara kita. Ancaman dari luar tersebut sedang marak-araknya diperbincangkan oleh masyarakat dan publik, yaitu serangan narkoba tentang penyelundupan dan pengedaran narkoba atau obat-obatan terlarang yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini membuktikan goyahnya keamanan dan ketahanan bangsa Indonesia. Entah seperti apa masa depan ketahanan nasional negeri ini ketika generasi muda kini terus-menerus dilumpuhkan oleh narkoba. Banyaknya penggunaan narkoba oleh anak-anak muda Indonesia sekarang ini benar-benar memprihatinkan. Penyebaran narkoba ini tentunya menimbulkan masalah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia haruslah mawas diri terhadap pengaruh dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri yang dapat mengancam keadaan di dalam negeri ini.

Kasus keputusan eksekusi mati terpidana narkoba memang mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya pengedar narkoba dari dalam negeri, tetapi juga yang berusaha menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Banyak pro-kontra yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan hukuman mati ini. Namun, pemerintah Indonesia tetap pada keputusan untuk melaksanakan hukuman ini. Pada saat kasus Bali Nine, hal ini mulai menimbulkan konflik di antaranegara Indonesia dengan Australia dan Brazil yang sedang memanas. Hal ini dikarenakan tersangka pengedar narkoba dari Australia yang dikenal dengan Bali Nine akan dieksekusi mati. Akan tetapi pihak Australia tidak menyetujui bila warga negaranya akan di hukum mati, sehingga Perdana Menteri Australia membuat pernyataan yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi sakit hati khususnya masyarakat Aceh, yaitu dengan menyinggung tentang bantuan Australia dalam bencana tsunami Aceh silam. Hal ini sangat menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia karena dengan geostrategic Indonesia ini akan dapat mendukung ketahanan Indonesia terhadap ancaman narkoba dari luar negeri. Hukuman mati ini diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah narkoba karena masalah ini sangatlah mengancam keamanan dan kedaulatan Bangsa Indonesia.

3. Konflik antar-suku di Papua

Beberapa tahun belakangan media di Indonesia, baik lokal maupun nasional memberitakan mengenai konflik antarsuku yang terjadi di Papua. Timika sering diplesetkan Tiap Minggu Kacau. Bukan Timika jika tak ada kekacauan, bentrok ataupun kerusuhan. Masih segar dalam ingatan kita bahwa di Timika selalu terjadi konflik antarsuku. Konflik antara PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan warga setempat juga turut mewarnai tragedi konflik di daerah itu. Sebagai contoh kerusuhan yang terjadi Tahun 1996. Kerusuhan yang telah menelan korban jiwa pada masyarakat sipil dan korban materil yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, pihak perusahaan menggunakan jasa aparat keamanan untuk menembaki, memperkosa, meneror dan mengancam warga Papua. Konflik di Timika pula yang akhirnya menghasilkan pemberian dana 1 persen dari pendapatan bersih PT FI pertahun untuk Masyarakat Amungme dan Kamoro. Walaupun kini dana 1 persen itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan PT FI sendiri.

Konflik berikutnya yang terjadi di Timika yakni antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai contoh kerusuhan menyikapi rencana pemerintah pusat untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di Timika. Konflik ini terjadi pada tahun 2004 yang menyebabkan 4 warga sipil tewas terkena panah. Konflik yang selalu terjadi di Timika juga antara masyarakat dan masyarakat. Contoh kasus misalnya konflik saling menyerang antara Suku Dani dan Suku Damal. Bahkan dalam catatan telah sepuluh kali terjadi di Timika. Seperti konflik antara Suku Dani dan Damal di Kwamki Lama dan juga konflik berlanjut di Banti dan Kimbeli di Tembagapura dekat PT FI mengeksploitasi emas, tembaga dan mineral ikutan lainnya. Konflik selanjutnya adalah antara aparat keamanan dan warga sipil. Contoh kasus, antara warga sipil yang berasal dari Suku Key dan Pihak Kepolisian. Konflik ini juga telah melumpuhkan aktivitas Kota Timika. Dalam konflik ini satu warga sipil tewas tertembak. Konflik selanjutnya yang sering terjadi di Timika adalah antara aparat keamanan sendiri. Contoh kasus seperti Aparat TNI saling melakukan penyerangan terhadap Aparat Kepolisian. Aparat TNI menyerang Pos Polantas di Timika Indah. Dalam konflik ini sejumlah pihak mengalami kerugian. Contoh konflik-konflik tersebut selalu terjadi di Timika dan telah membuka peluang untuk timbul lagi konflik lama karena dalam proses penyelesaian tak pernah tuntas. Keadilan dalam penyelesaian kasus konflik bagai panggang jauh dari bara. Contoh kasus penyelesaian perdamaian misalnya ketika penyelesaian denda adat antara Suku Dani dan Damal. Denda adat terkumpul Rp 2 Miliar. Uang sebanyak itu diperoleh melalui bantuan perusahaan yang beroperasi di Timika dan pemerintah setempat. Juga diperoleh dari

hasil usaha pihak-pihak yang bertikai. Dana sebanyak itu bukan untuk membayar musuh atau pihak lawan tetapi pihak untuk membayar keluarga korban dalam sukunya sendiri. Akhirnya dendam antara suku-suku yang bertikai masih terus berlanjut. Jika Aparat Polisi tak mengungkap siapa pelaku penembakan dan juga jika tak diberikan hukuman setimpal, maka dendam masih berlanjut. Jika dilihat secara seksama, maka konflik di Timika lebih intensif dibanding konflik yang terjadi kota-kota lainnya di Papua. Hal ini terjadi mungkin saja karena ada aktor yang ‘bermain’ di balik konflik antarsuku di Papua.

Jika dianalisa, beberapa hal yang menyebabkan terus berlangsungnya konflik di Papua antara lain:

- Banyaknya warga pendatang baru yang berasal dari luar Papua
- Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di Papua
- Kalangan pemuda yang tidak meuruti ketua adat
- Balas dendam masih menjadi budaya di Papua
- Provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Konflik antarsuku yang terjadi di Papua memang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Konflik yang terjadi tidak hanya di satu daerah saja, tetapi di beberapa daerah dengan sebab yang berbeda. Konflik yang terjadi di Papua adalah seputar balas dendam, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sehingga timbul pertikaian dengan aparat keamanan, konflik dengan perusahaan yang ada di Papua, dan lain-lain. Beberapa dampak dari adanya konflik di Papua antara lain:

- Rusaknya fasilitas umum
- Hancurnya pemukiman warga
- Jatuhnya korban, baik yang luka-luka maupun tewas
- Warga yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban, sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis
- Masyarakat merasa tidak aman dengan adanya konflik yang terjadi
- Menimbulkan perpecahan di masyarakat.
- Hilangnya rasa kepercayaan dalam masyarakat

4. *Terorisme*

Kasus terorisme merupakan kasus yang seringkali terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang pernah mengguncang Indonesia antara lain:

- **1 Agustus 2000**, bom meledak di depan rumah Duta Besar Filipina. Menteng, Jakarta Pusat. Ledakan tersebut mengakibatkan 2 orang tewas dan 21 orang terluka. Duta Besar Filipina Leonides T. Caday juga ikut terluka. Aksi ini dilakukan oleh Abdul Jabar bin Ahmad Kandai, Fatur Rahman AlGhozi, dan Edi Setiono.
- **24 Desember 2000**, bom malam natal di 38 gereja di malam natal di 38 gereja di berbagai daerah, antara lain Jakarta, Pekanbaru, Medan, Bandung, Batam, Mojokerto, Mataram, dan Sukabumi serta beberapa kota lain. Rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan 19 jiwa tewas dan 120 terluka (International Crisis Group, 2002). Pelaku serangan ini adalah Hambali, Zoefri, Abdul Jabar, Edi Setiono, Asep, Musa, dan Dani.
- **12 Oktober 2002**, bom diledakkan di Sari Club dan Paddy's Cafe di Jalan Legian, Kuta, Bali. Peristiwa tersebut mengakibatkan sebanyak 202 orang tewas, 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia 209 orang mengalami luka-luka. Bom Bali I dilakukan oleh Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufon.
- **5 Agustus 2003**, bom meledak di Hotel JW Marriot Jakarta yang mengakibatkan 11 orang tewas, dan 152 orang luka-luka. Serangan ini merupakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Asmar Latin Sani.
- **9 September 2004**, bom meledak di Kedutaan Besar Australia yang mengakibatkan 5 orang tewas dan ratusan luka-luka. Serangan bom bunuh diri dilakukan oleh Heri Kurniawan alias Heri Golun yang dibantu oleh Rois, Ahmad Hasan, Apuy, dan Sogir alias Abdul Fatah.
- **1 Oktober 2005**, bom kembali meledak di Bali, tepatnya di Jimbaran Beach Resort, Kuta. Kurang lebih 22 orang tewas dan 102 luka-luka. Serangan ini dilakukan oleh Anif Solchanudin alias Pendek bin Suyadi.
- **17 Juli 2009**, bom bunuh diri meledak di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton menyebabkan 7 orang tewas, 3 diantaranya adalah warga asing dan 50 orang terluka. Serangan ini dilakukan oleh Dani Dwi Permana (Bogor) dan Nana Ikhwan Maulana (Pandeglang) anak buah dari Noordin M. Top, anggota Jamaah Islamiyah.

- **15 Maret 2010**, penembakan terhadap seorang anggota polisi, Briptu Yona Anton Setiawan, yang tewas dengan luka tembak di bagian kepala di Markas Polsek Prembun, Kabupaten Kebumen. Penembakan ini dilakukan oleh Yuli Harsono (International Crisis Group, 2011:10).
- **10 April 2010**, Sekitar pukul 08.30 WIB, terjadi kasus penembakan terhadap dua anggota Polisi, yakni Briptu Wagino dan Briptu Iwan Eko Nugroho yang ditemukan tewas dengan luka tembak di Pos Polisi Kentengrejo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penembakan ini juga dilakukan oleh Yuli Harsono (International Crisis Group, 2011:10).
- **15 Maret 2011**, serangan bom buku terhadap aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdala di Utan Kayu, Gories Mere di Badan Narkotika Nasional, dan Yapto Suryosumarno di Ciganjur Jakarta Selatan. Selain itu musisi Ahmad Dhani juga mendapat kiriman bom pada hari yang sama di kantor Republik Cinta Manajemen Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pengiriman Bom Buku dilakukan oleh Pepi Fernando, Hendi, Mugiono, Watono, Ade Guntur, dan Febri.
- **15 April 2011**, bom bunuh diri diledakkan di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. Serangan om bunuh diri dilakukan oleh Muhammad Syarif.
- **19 Agustus 2012**, sebuah granat meledak di Pos Pengamanan (Pospam) Gladak, Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini hanya mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Pelaku penyerangan tidak dapat dikenali.
- **3 Juni 2013**, sebuah bom bunuh diri diledakkan di depan Masjid Mapolresta Poso, Sulawesi Tengah. Tidak ada korban jiwa selain pelakunya. Serangan ini dilakukan oleh Zaenul Arifin alias Arif Petak dari Lamongan, Jawa Timur.
- **20 Agustus 2015**, terjadi baku tembak antara kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso melawan Densus 88 Polri dan TNI di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. MIT ini berbaiat kepada ISIS. Perlu waktu yang lama bagi TNI dan Polri untuk menghancurkan kelompok ini. Santosos tewas pada 18 Juli 2016.
- **14 Januari 2016**, terjadi serentetan peristiwa terorisme berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. Sedikitnya

delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Lima orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Keempat pelaku yang sudah berhasil diidentifikasi bernama Dian Juni Kurniadi, Muhammad Ali, Afif atau Sunakin dan Ahmad Muhazan. Pelaku Ahmad Muhazan merupakan bomber bunuh diri di dalam kedai kopi Starbuck. Aman Abdurrahman diduga sebagai dalang dari Peristiwa ini. Ia diduga kuat juga sebagai tokoh penting Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

- Terjadi berbagai serangan yang menargetkan polisi **sepanjang 2017**, mulai dari kasus bom Kampung Melayu, penyerangan Polda Sumatera Utara, penikaman polisi di Blok M, penyerangan Polres Banyumas, hingga pembakaran kantor polisi di Sumatera Barat.
- Serangan teroris di tiga gereja dan Mapolresta Surabaya 2018. Pelaku bom bunuh diri yang menyerang tiga gereja di Surabaya, Jawa timur pada Minggu **13 Mei 2018** semuanya merupakan anggota dari satu keluarga. Sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 40 orang luka-luka ketika kelompok itu menargetkan sidang Misa Minggu di kota terbesar kedua di Indonesia. Identitas keluarga itu adalah pasangan suami-istri Dita Oepriyanto dan Puji Kuswati, dan anak-anak mereka adalah Fadhila Sari, Pamela Riskita, Yusuf Fadil, Firman, Halim. Selang satu hari pengeboman tiga gereja di Surabaya, terjadi serangan bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya. Serangan ini juga dilakukan oleh satu keluarga. Mereka adalah suami istri pengebom dan tiga anaknya yaitu Tri Murtiono, sebagai kepala keluarga, istri pelaku Tri Ernawati, dan anak-anak mereka AAP (masih hidup), MDS, dan MDA. Sesungguhnya juga terjadi ledakan di apartemen Wonocolo, tetapi lebih disebabkan karena faktor kecelakaan daripada serangan teroris. Bom itu terdapat dalam ruangan yang disewa oleh satu keluarga yang patut diduga juga akan melakukan aksi serangan di Surabaya.
- Serangan teroris di Mapolda Riau, **16 Mei 2018**. Para pelaku nekat menabrak dan menyabet polisi menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya. Pelaku yang mengendarai mobil toyota avanza warna putih bernomor polisi BM 1192 RQ itu tiba-tiba menerobos masuk ke dalam Mapolda Riau dari Jalan Sudirman. Dalam serangan itu seorang polisi tewas ditabrak oleh pelaku yang membawa mobil. Dua orang petugas yang berjaga disabet menggunakan senjata oleh terduga teroris. Para pelaku pun langsung ditembak mati oleh polisi sesaat setelah melakukan penyerangan ke Mapolda Riau. Menurut keterangan polisi, serangan teror yang dilakukan di Mapolda Riau adalah berasal dari Negara Islam Indonesia

(NII) yang sudah berbaiat kepada ISIS. Keempat pelaku adalah Daud, Adi Sufiya, Ical, dan Suwardi.

5. Ancaman dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi

Dalam konteks hubungan antar bangsa, terhubungnya jaringan pitalebar Indonesia dengan jaringan broadband global memiliki bobot tugas memilih politik luar negeri yang sangat berat. Apakah Indonesia akan begitu saja menyamakan politik luar negeri untuk Cyber World ini sama dengan ketika bangsa Indonesia menyatakan politik luar negeri di dunia fisik yang bebas aktif. Untuk dapat menjawab dengan pas, sebaiknya memahami apa saja yang mungkin terjadi di dunia cyber ini. Ada beberapa gambaran sederhana tentang situasi tersebut:

- **Globalisasi Ekonomi Online**

Dengan jaringan broadband, seluruh negara di dunia terhubung, semakin banyak transaksi online dan belanja online. Melintasi batas negara dengan pembayaran melalui kartu kredit dan uang digital lainnya. Komoditas digital yang non-fisik semakin beragam sehingga lalu-lintas 'barang dagangan' pun melalui jaringan broadband -- tidak melalui pengapalan dan pelabuhan. Tidak melalui custom-clearance, tidak melalui bea dan cukai, belum terjangkau audit perpajakan, tidak ada commercial-present, dan sebagainya. Globalisasi online terjadi begitu saja di depan mata dan perdagangan global secara online telah terjadi semakin marak. Tidak ada kendali negara dan tidak ada kedaulatan ekonomi. Maka, ini merupakan agenda penting dalam hal kedaulatan cyber.

- **Ancaman gangguan terhadap transaksi online**

Pergeseran transaksi bisnis dari temu-fisik menjadi transaksi secara online menuntut perhatian dalam hal keamanan transaksi dan kepercayaan publik untuk menggunakannya. Hal ini telah diangkat dalam Deklarasi WSIS 2003 Geneva dan WSIS 2005 Tunisia yang tertuang dalam kunci kelima C5: "Building Confidence and Security in the use of ICTs". Maka negara harus hadir dan perlu memiliki strategi pengamanan transaksi online. Infrastruktur penting untuk keamanan transaksi online ini adalah Public-Key-Infrastructure yang harus dibangun dan dimiliki Indonesia, agar mampu berdaulat dalam menata dan memantau lalu-lintas perdagangan online nasional. Hingga saat

ini, penentu keabsahan pembayaran online Indonesia masih menggunakan infrastruktur di luar negeri sehingga rekaman kegiatan online ini berada di luar negeri.

- Globalisasi Ideologi, Politik, Sosial, Budaya

Peran media sosial melalui jaringan broadband sudah tidak perlu dibahas lagi secara rinci. Keterhubungan global yang tanpa gerbang cyber telah membuat NKRI menjadi negara tanpa tapal batas. Seluruh pemegang smartphone dan gadget lainnya bebas berhubungan dengan siapa saja di mana saja dan kapan saja, dari tempat terbuka ataupun tempat pribadi. Bila di dunia nyata masih berlaku rasa malu dilihat banyak orang, tetapi di dunia cyber tidak ada lagi kendali sosial itu karena perbuatan apapun bisa dilakukan di ruang pribadi. Maka tanpa kehadiran kendali negara di dunia cyber Indonesia, kedaulatan NKRI niscaya tidak ada lagi. Ideologi, politik, dan sosial-budaya dari manapun dapat dengan mudah diakses dan dikirim masuk ke wilayah NKRI melalui jaringan broadband global.

- Ancaman global terhadap anak nusantara

Catatan anak dan pemuda yang menjadi korban kejahatan cyber sudah cukup banyak, ajakan radikalisme, pornografi, pornografi-anak, ataupun bully secara online, adalah daftar panjang dampak keterhubungan global. Semua anak dan remaja pemegang gadget menjadi amat rentan terhadap gangguan dunia cyber karena pada usia muda ini rasa ingin tahunya amat besar. Maka negara-negara yang sudah menyadari adanya ancaman ini sudah menerbitkan UU Perlindungan Anak dari konten internet yang membahayakan.

- Ancaman global terhadap warga Negara

Semua warga negara pemegang gadget yang terhubung ke jaringan global akan menjadi rentan terhadap gangguan kejahatan cyber dan eksploitasi data pribadi. Mulai dari gangguan penawaran produk barang dan jasa, hingga ke informasi yang menipu, ataupun hilangnya hak privasi karena surveillance, penyadapan, personal data harvesting (panen data pribadi), dan sebagainya. Semakin maraknya aplikasi yang berebut data pengguna dan mencatat semua data pribadi, nomor telepon, dan

nomor IMEI gadget, semakin membuat masyarakat tidak berdaya pada saat data pribadi tersebut dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dan dipindah tangankan entah kemana. Bahkan rekam jejak kegiatan sehari-hari pun disimpan oleh aplikasi tertentu sehingga hak pribadi penduduk menjadi hilang. Maka negara perlu menerbitkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, Privacy, dan Perlindungan Penduduk.

- Ancaman perang cyber

Selama ada perang fisik tentu ada perang cyber karena manusianya sama. Ada serangan cyber maka ada pertahanan cyber. Sasarannya adalah public-utility yang dikendalikan secara terpusat. Baik yang berskala lokal, nasional, apalagi global. Semakin terpusat sistem kendali dari public-utility itu, semakin rentan untuk dilumpuhkan dalam sekali serangan. Maka umumnya, negara yang sadar adanya potensi perang cyber akan membangun infrastruktur sistem kendali public-utility-nya secara eksklusif agar memiliki tingkat keamanan dan ketahanan yang tinggi. Tidak tepat jika jaringan umum (public-network) dipakai dalam sistem kendali public-utility apalagi untuk sistem pertahanan dan keamanan nasional.

6. Barang KW dan merk impor yang mengancam produk lokal

Perdagangan bebas yang akan diterapkan di Indonesia dinilai dapat mengancam eksistensi perusahaan lokal. Sebagai konsekuensi ini, produk impor akan lebih mudah masuk dan membanjiri pasar domestik. Jika hal ini tidak diantisipasi, sangat mungkin perusahaan lokal gulung tikar. Pemerintah melalui KPPI, siap melakukan pengamanan (safeguards). Pasar dunia cenderung semakin terbuka dan bebas hambatan. Hal ini merupakan fenomena wajar, karena setiap negara akan melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan memaksimalkan ekspor. Setiap hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif diupayakan untuk dikurangi atau dihapuskan, melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Bagi Indonesia, kondisi ini cukup menguntungkan karena merupakan negara ekspor. Negara akan memiliki peluang lebih untuk melakukan penawaran ke negara lain. Namun, tuntutan ini juga akan membawa dampak negatif, yang bisa merugikan produsen di dalam negeri. Khususnya bagi produsen yang memiliki produk sejenis dengan barang impor.

Konsumen di Indonesia, cenderung membeli dan mengonsumsi produk dari luar negeri. Padahal, banyak produk Indonesia yang tidak kalah bagus. Untuk membuktikan hipotesa kami, kalian bisa melihat barang-barang yang kalian gunakan dan kemungkinan besar banyak produk yang berasal dari luar negeri.

Indonesia mengalami kendala mengenai produk dalam negeri yang kalah saing dengan produk luar negeri. Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat perdagangan di Indonesia sendiri tanpa harus membeli produk dari luar negeri. Indonesia kalah dalam bersaing di dunia perdagangan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemakaian produk lokal. Karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak mengonsumsi atau menggunakan produk luar dari pada dalam. Serta, gaya mewah yang terjadi apabila memakai produk luar. Tingkat gengsi yang tinggi pun merupakan faktor utama penyebab hal ini terjadi.

Padahal, apabila konsumen Indonesia lebih memilih untuk membeli dan mengonsumsi produk dalam negeri, hal ini akan meningkatkan produksi unit kecil menengah (UKM) sehingga UKM akan berkembang dan menjadi perusahaan besar. Hal ini akan meningkatkan produksi. Dalam melakukan produksi, perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki pengangguran dan memiliki pekerjaan maka hal ini akan meningkatkan pajak sehingga devisa negara akan meningkat. Dengan meningkatnya devisa negara pembangunan dan kesejahteraan akan semakin merata.

3.3. Bentuk Bela Negara

3.3.1 Bela Negara secara Fisik

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. (Winarno: 2007: 185)

Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipi (Hansip), mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan dalam masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sementara fungsi perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang. (Winarno:2007:185)

Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur, dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil, misalnya dokter ditempatkan di Rumah Sakit Tentara, Pengacara di Dinas Hukum, akuntan di Bagian Keuangan, penerbangan di Skuadron Angkutan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tetapi memperkenalkan “dwifungsisipil”. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi “konsep bela negara” dimana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tetapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. (Winarno:2007: 185)

1.3.2 Bela Negara secara Non-Fisik

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti “memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
2. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal
3. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
4. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika).
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Pembekalan mental spiritual dikalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Allah SWT, melalui ibadah sesuai agama/ kepercayaan masing-masing.
7. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama
8. Pengabdian tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan
9. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan Negara
10. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misalnya menjadi sukarelawan bencana alam
11. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan Negara untuk melaksanakan pembangunan

Sampai saat ini belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Apabila nantinya telah keluar

undang-undang mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi maka akan semakin jelas bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Dinamika ketahanan nasional Indonesia sejak merdeka sampai saat ini mengalami beberapa perubahan, yaitu : gagasan Tannas oleh Seskoad pada tahun 1960-an, gagasan Tannas oleh Lemhannas pada tahun 1968, upaya penggagasan Tannas 1962 oleh Lemhannas, revisi Gagasan Tannas oleh Lemhanas pada tahun 1969, gagasan Tannas oleh Lemhannas pada tahun 1972, gagasan Tannas berdasarkan SK Menhamkam/Pangab No.SKEP/1382/XI/1974, gagasan Tannas menurut Presiden Soeharto pada tahun 1975, gagasan Tannas menurut GBHN 1978-1997. Meski gagasan Tannas masih relevan sampai saat ini menurut data pengukuran yang dilakukan Lemhamnas berdasar aspek astra gatra. Kondisi Tannas kita, konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi, dianggap rapuh sehingga dibutuhkan pengkajian gagasan Tannas yang lebih relevan.

Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran asta gatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan asta gatra yang sifatnya integral komprehensif.

Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional.

Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter.

Bela Negara

Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara nonfisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela Negara dapat secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara nonfisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air (salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak), serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya.

4.2.Kritik dan Saran

Urgensi dari aktualisasi upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Ketahanan Nasional bagi Indonesia semakin perlu diperhatikan. Sebagai negara ke-4 yang majemuk, sudah seharusnya Indonesia punya konsepsi sistem pertahanan dan keamanan nasional yang berintegritas. Solusi dari makalah ini perlu dipertimbangkan mengingat urgensinya. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk menguatkan dan memperbaiki sistem pertahanan dan keamanan negara melalui perbaikan materi muatan konstitusi Indonesia

Kritik dan saran sangat saya harapkan dalam makalah ini, segala kekurangan yang ada dalam makalah ini mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuan saya dalam penyusunannya. Segala hal yang tidak relevan, kekurangan dalam pengetikan atau bahkan ketidakjelasan dalam makalah ini merupakan proses saya dalam mempelajari bidang studi ini dan diharapkan saya yang menulis ataupun bagi pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/12/pengertian-ketahanan-nasional.html>

<http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi.html>

<https://gracellya.wordpress.com/2012/04/16/ketahanan-nasional/>

<http://reganregiantara.blogspot.com/2016/04/sejarah-lahirnya-ketahanan-nasional.html>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1978/IV~MPR~1978TAP.HTM>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara

<https://adhisuryaperdana.wordpress.com/pertanian-ugm/ketahanan-nasional/>

<https://posore.com/2018/11/06/saat-atgh-meningkat-kondisi-ketahanan-nasional-indonesia-kurang-tangguh/>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/10/ketahanan-nasional-itu-harus-terus-dipupuk-dan-diperkuat-semua-generasi-bangsa-kata-suhardi-alius>

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=KONFLIK+ANTAR-SUKU+DI+PAPUA%3A+Bencana+Sosial+atau+Kriminal%3F&dn=20181015134605>

<https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018>

<https://sbm.binus.ac.id/2016/08/02/kecenderungan-masyarakat-indonesia-mengkonsumsi-produk-luar-negeri/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/12/06/5-potensi-ancaman-pertahanan-nasional-versi-hadi-tjahjanto-415311>

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3131693/perang-cyber-dan-ancaman-kedaulatan-nkri>

<http://dejuniarta.blogspot.com/2015/05/ketahanan-nasional-dan-bela-negara.html>